

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA SINGA GEMBARA KECAMATAN SANGATTA UTARA KABUPATEN KUTAI TIMUR

Angelina Christine P¹ H.Syahrani², Santi Rande³ ¹

Abstrak

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Singa Gembara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, apakah pelaksanaan dari PKH selama ini sudah sesuai dengan indikator keefektifitasan, kecukupan, pemerataan, responsivitas serta ketepatan PKH dan juga untuk mengetahui faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Singa Gembara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian di Desa Singa Gembara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan penelitian kepustakaan, observasi, wawancara, dokumentasi, serta melalui data ataupun berkas yang diberikan oleh pihak Desa maupun oleh pihak Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur. Narasumber pada penelitian ini ada sebanyak 12 (dua belas) orang yang terdiri dari Koordinator PKH ditingkat Kabupaten, pendamping PKH, serta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH. Analisis data dilakukan dengan cara pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, pengambilan kesimpulan dan verifikasi data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Evaluasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Singa Gembara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur pada umumnya sudah berjalan cukup baik. Efektivitas dari Program Keluarga Harapan sudah berjalan cukup baik walaupun ada sedikit kendala dalam pelaksanaannya. Kemudian jika dilihat dari kecukupannya, program ini sudah cukup membantu masyarakat yang miskin. Selanjutnya dari segi pemerataan, program ini masih kurang merata dalam hal pemilihan KPM PKH, dalam Responsivitasnya, program ini mendapatkan respon yang positif maupun negatif, dan jika ditinjau dari ketepatannya, sejauh ini Program Keluarga Harapan sudah sangat bermanfaat bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dalam rangka pencapaian pelaksanaan program ada beberapa faktor penghambat yang memengaruhinya.

Kata Kunci : Evaluasi, Program Keluarga Harapan

¹ Mahasiswa Program S1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

² Dosen Pembimbing I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

³ Dosen Pembimbing II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Email:

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kemiskinan dapat disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah penyebab kemiskinan yang potensinya berasal dari diri seseorang dan atau keluarga serta lingkungan sekitarnya. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah dan situasi lain yang berpotensi membuat seseorang jatuh miskin seperti kekurangan bahan baku atau bencana alam. Berikut ini adalah dampak-dampak yang timbul akibat terjadinya kemiskinan :

1. Pengangguran.

Dengan banyaknya pengangguran, berarti mereka tidak bekerja dan tidak mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Secara otomatis, dengan adanya pengangguran maka akan menurunkan daya saing dan beli masyarakat.

2. Tindak kriminalitas.

Tindak kriminalitas biasanya muncul karena seseorang tidak mampu lagi mencari nafkah yang benar dan halal, seperti mencuri atau merampok.

3. Masyarakat miskin tidak dapat menjangkau dunia sekolah atau pendidikan. Akhirnya, kondisi masyarakat miskin semakin terpuruk lebih dalam. Tingginya tingkat putus sekolah berdampak pada bertambahnya pengangguran akibat tidak mampu bersaing di era globalisasi yang menuntut keterampilan disegala bidang.

4. Kesehatan.

Biaya pengobatan yang terjadi pada klinik pengobatan bahkan rumah sakit swasta besar sangat mahal dan biaya pengobatan tersebut tidak terjangkau oleh kalangan masyarakat miskin. Kelima, konflik social bernuansa SARA. Konflik SARA terjadi karena ketidakpuasan dan kekecewaan atas kondisi kemiskinan yang semakin hari semakin akut. Hal ini menjadi sebuah bukti lain dari kemiskinan yang kita alami. Terlebih lagi fenomena bencana alam yang sering terjadi di negeri ini, yang berdampak langsung terhadap meningkatnya angka kemiskinan. semuanya terjadi hamper merata di setiap daerah di Indonesia, baik di pedesaan maupun diperkotaan.

Menurut Undang-undang nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin, fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. Tentu saja pemerintah tidak tinggal diam saja melihat kondisi masyarakat ataupun fakir miskin yang sangat membutuhkan bantuan, sehingga pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat

kesejahteraan rakyat melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

Dalam mengatasi masalah kemiskinan tersebut sesuai dari tujuan dari negara yaitu untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial” tujuan negara tersebut terdapat di dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea ke empat. Di dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2010 juga membahas tentang Kesejahteraan Sosial. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional, Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial. Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sistem Jaminan Sosial Nasional bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya. Berikut ini adalah beberapa program jaminan sosial yang ada di Indonesia, yaitu : PKH, Jamkesmas, Program RASKIN, KIS, KIA dll. Pemerintah membuat berbagai peraturan, kebijakan bahkan berbagai macam program yang dibuat khusus untuk membantu masyarakat miskin.

Salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencapai tujuan negara tersebut adalah membuat suatu program yang dapat mensejahterakan masyarakat, dan salah satu program yang dibuat oleh pemerintah adalah Program Keluarga Harapan yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial. Program Keluarga harapan adalah suatu program yang memberikan bantuan tunai bersyarat kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan melaksanakan kewajibannya sebagai penerima bantuan dari PKH, tujuan untuk memutuskan rantai kemiskinan bagi keluarga miskin.

PKH merupakan suatu program yang dalam pelaksanaan program tersebut melibatkan beberapa kementerian dan lembaga-lembaga yang terkait dalam PKH. Telah ditetapkan Kementerian atau Dinas Sosial sebagai koordinator pelaksanaan PKH, Dinas Kesehatan yang bertanggungjawab sebagai penyedia layanan kesehatan masyarakat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama bertanggung jawab atas penyediaan layanan pendidikan, Dinas Komunikasi dan Informatika bertanggung jawab atas pelaksanaan strategi komunikasi dan pelaksanaan sosialisasi program.

Sasaran dari program ini adalah Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang memiliki anggota keluarga dengan syarat komponen kesehatan (ibu hamil atau nifas, anak berusia dibawah 6 tahun atau balita, dan anak pra-sekolah) dan dari

komponen pendidikan (SD sederajat, SMP sederajat, SMA sederajat) atau anak usia 7-21 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan wajib 12 tahun, dan anak penyandang disabilitas berusia 0-21 tahun dan untuk masyarakat yang lanjut usia. Program Keluarga harapan (PKH) mulai dilaksanakan di Indonesia sejak tahun 2007 yang dilaksanakan di 7 provinsi yaitu: Nusa Tenggara Timur, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Gorontalo serta Sulawesi Utara. Kabupaten Kutai Timur provinsi Kalimantan Timur yang mulai melaksanakan Program Keluarga Harapan pada tahun 2013 hingga sekarang, dan sampai saat ini terdapat 18 kecamatan yang telah memperoleh bantuan PKH yaitu, Sangatta Utara, Sangatta Selatan, Sangkulirang, Bengalon, Muara Ancalong, Muara Wahau, Batu Ampar, Kongbeng, Teluk Pandan, Kaubun, Sandaran, Muara Bengkal, Long Mesangat, Karanganyar, Telen, Busang, Rantau Pulung serta Kaliurang.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana evaluasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Singa Gembara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur ? dan Apa saja faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Singa Gembara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur?”.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian yang ingin dicapai adalah untuk Untuk mengetahui dan menggambarkan evaluasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Singa Gembara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Singa Gembara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur.

Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah pengetahuan dan juga wawasan mengenai teori-teori apa saja yang berhubungan dengan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan.
- b. Secara praktis hasil penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan gambaran ataupun pemahaman mengenai Program Keluarga Harapan, sehingga hasil dari penelitian ini dapat menjadi sarana monitoring dan sebagai alat evaluasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Singa Gembara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur.

Teori dan Konsep Kebijakan Publik

Menurut Anderson (dalam Budi Winanro 2012:21) kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang di tetapkan oleh

seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Lain dari hal itu Richard Rose (dalam Leo Agustino 2006:7) pun berupaya untuk mendefinisikan kebijakan publik sebagai, “sebuah rangkaian panjang dari banyak atau sedikit kebijakan yang saling berhubungan dan memiliki konsekuensi bagi yang berkepentingan sebagai keputusan yang berlainan.”

Budi Winarno (2012:35-37) berpendapat bahwa kebijakan memiliki beberapa tahap kebijakan, yaitu sebagai berikut:

1. Tahap penyusunan Agenda
2. Formulasi Kebijakan
3. Adopsi Kebijakan
4. Implementasi Kebijakan
5. Evaluasi Kebijakan

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik (*public policy process*) sekaligus studi yang sangat crucial. Bersifat crucial karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak akan bisa diwujudkan dengan demikian pula sebaliknya, bagaimanapun baiknya persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan, kalau tidak dirumuskan dengan baik maka tujuan kebijakan juga tidak akan bisa diwujudkan.

Menurut Ripley dan Franklin (dalam Budi Winarno 2012:147) implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*).

Evaluasi Kebijakan

Menurut Edi Suharto (2007:40) secara formal, evaluasi merupakan tahap “akhir” dari sebuah proses pembuatan kebijakan. Namun demikian, dari evaluasi ini dihasilkan masukan-masukan guna penyempurnaan kebijakan atau perumusan kebijakan selanjutnya. Dengan begitu proses formulasi kebijakan menjadi mirip roda atau spiral yang berputar tiada akhir.

Yang menjadi suatu acuan ataupun yang menjadi tolak ukur dari hasil evaluasi suatu kebijakan dapat dilihat dari terpenuhinya indikator-indikator dari evaluasi tersebut. Berikut adalah salah satu indikator evaluasi kebijakan yang di sampaikan oleh William Dunn, yaitu : Efektivitas, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas dan ketepatan.

Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang bersifat global. Artinya, kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi dan menjadi perhatian banyak

orang di dunia ini. Kemiskinan memiliki banyak definisi. Sebagian orang memahami istilah kemiskinan dari prespektif subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihat dari segi moral dan evaluatif. Meskipun sebagian besar konsepsi mengenai kemiskinan sering dikaitkan dengan aspek ekonomi, kemiskinan sejatinya menyangkut pula dimensi material, sosial, kultural, institusional, dan struktural (Edi Suharto 2013:14-15)

Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan adalah salah satu program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial dibidang kesehatan dan pendidikan dan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah Kementerian Sosial Pusat berupa bantuan dana non tunai bersyarat kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan melaksanakan kewajibannya sebagai penerima bantuan dari PKH. Tujuan dari adanya PKH adalah untuk mengentaskan kemiskinan, dan sasaran dari PKH adalah keluarga yang memenuhi persyaratan di dalam komponen kesehatan, komponen pendidikan dan komponen kesejahteraan sosial.

Nominal bantuan dana yang diberikan kepada KPM adalah Rp.1.890.000 yang kemudian akan disalurkan atau dibagikan pada 4 tahap pencairan yaitu pada bulan Februari, Mei, Agustus, November.

Definisi Konsepsional

Pada hakikatnya konsep merupakan istilah yang dipergunakan oleh seorang peneliti untuk menggambarkan fenomena yang hendak diteliti. Oleh karena itu perlu didefinisikan secara jelas supaya dapat dimengerti maksudnya. Maka definisi konsepsional dari penelitian ini adalah mengenai evaluasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Singa Gembara Kabupaten Kutai Timur yaitu suatu penilaian hasil dari PKH berdasarkan indikator evaluasi menurut William Dunn (dalam Subarsono 2005:126) yaitu sebagai berikut : Efektivitas, kecukupan, pemerataan, responsivitas, ketepatan dari hasil pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) sehingga keluarga tersebut dapat sejahtera.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif dimana yang bersifat deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran tentang deskripsi suatu keadaan secara obyektif. Secara harfiah, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat deskripsi mengenai situasi-situasi/kejadian-kejadian.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang digunakan penulis untuk mengetahui bagaimana evaluasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Singa Gembara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur. Berikut ini adalah beberapa indikator evaluasi yang dapat mempengaruhi hasil dari pelaksanaan program tersebut menurut William Dunn (dalam Subarsono 2005:126) :

- a. Efektivitas
- b. Kecukupan
- c. Pemerataan
- d. Responsivitas
- e. Ketepatan

Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan informan kunci dan informan pendukung, berupa kata - kata dan jawaban yang diberikan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data - data yang diperoleh dan dikumpulkan dari sumber - sumber lain. Data tersebut antara lain seperti dari buku - buku referensi yang terdapat di perpustakaan, baik perpustakaan Universitas, Fakultas maupun perpustakaan daerah, profil atau hasil penulisan yang relevan dengan penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data secara deskriptif yaitu dalam penelitian kualitatif, metode analisis deskriptif ini bersifat memaparkan keadaan obyek atau subyek penelitian pada saat penelitian tersebut dilakukan sebagaimana adanya.

Jadwal Penelitian

Penelitian ini disesuaikan dengan situasi lapangan dan dengan persetujuan dari obyek yang bersangkutan. Adapun lokasi dari penelitian ini adalah bertempat di Desa Singa Gembara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat menunjukkan bahwa efektivitas PKH sudah berjalan dengan cukup baik walaupun sempat mengalami keterlambatan pencairan dana yang disebabkan oleh adanya perubahan sistem pencairan guna mempermudah KPM dalam mengambil haknya sebagai KPM PKH.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat menunjukkan bahwa sejauh ini kecukupan dari PKH sudah cukup membantu meringankan beban masyarakat miskin yang ada di Desa Singa Gembara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur. Dimana dengan adanya bantuan tersebut dapat membantu meringankan beban KPM dalam bidang kesehatan dan juga dibidang pendidikan.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat menunjukkan bahwa dalam hal pemerataan dari pemilihan ataupun penyeleksian KPM PKH masih mengalami kendala dilapangan yaitu, ada beberapa KPM yang tidak sesuai dengan ketentuan ataupun persyaratan yang telah ditentukan. Namun pihak Dinas Sosial tidak tinggal diam begitu saja, setiap bulannya selalu pertiga bulan selalu ada pembaharuan data yang akan menyeleksi kembali KPM PKH.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat menunjukkan bahwa responsivitas KPM PKH sejauh ini sudah cukup baik, walaupun belum sepenuhnya memberikan kepuasan kepada masyarakat di Desa Singa Gembara. dikarenakan dalam pemilihan KPM PKH masih kurang sesuai dengan ketentuan dan syarat yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan *key informan* maupun *informan* maka dapat disimpulkan bahwa Program Keluarga Harapan sudah cukup bermanfaat bagi KPM PKH.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yang menjadi faktor penghambat dalam evaluasi pelaksanaan program keluarga harapan di Desa Singa Gembara yaitu pengawasan tidak tepat waktu dalam hal pencairan dana, dan juga kurangnya respon dari KPM PKH maupun respon dari pihak penyelenggara PKH.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Efektifitas dari Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Singa Gembara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur sudah cukup dapat dikatakan efektif jika dilihat bahwa sejauh ini PKH dapat membantu meringankan beban hidup masyarakat yang kurang mampu dalam bidang kesehatan dan juga di bidang pendidikan. Namun dalam penyaluran dananya pernah terjadi penundaan pencairan.
2. Kecukupan dari Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Singa Gembara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur sudah cukup baik

dalam mengatasi permasalahan ekonomi masyarakat miskin walaupun belum sepenuhnya dapat memenuhi semua kebutuhan KPM.

3. Pemerataan dari Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Singa Gembara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur menurut peneliti jika dilihat dari hasil wawancara dan juga melihat keadaan warga sekitar di Desa Singa Gembara nampaknya belum cukup merata kepada semua masyarakat, sehingga banyak masyarakat miskin yang tidak menerima bantuan PKH, sedangkan masyarakat yang hidupnya sudah cukup layak masih mendapatkan bantuan dana PKH tersebut.
4. Responsivitas dari Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Singa Gembara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur mendapatkan respon yang sangat baik dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ada di wilayah ini, namun ada juga masyarakat yang mengeluhkan tentang adanya program tersebut dikarenakan permasalahan pendataan masyarakat miskin yang kurang menyeluruh sehingga banyak masyarakat yang merasa layak mendapatkan bantuan tersebut namun tidak bisa menerima bantuan tersebut.
5. Ketepatan dari Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Singa Gembara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur dapat memberikan manfaat kepada masyarakat miskin sehingga dengan adanya bantuan dari Program Keluarga Harapan ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin khususnya di Desa Singa Gembara.
6. Faktor Penghambat dalam evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Singa Gembara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur adalah kurangnya proses pendampingan dan terlambatnya proses pencairan dana PKH.

Saran

Dari faktor penghambat yang telah dipaparkan dikesimpulan atas maka saran yang penulis dapat diberikan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk ke depannya diharapkan kepada Koordinator dan tim pendamping PKH agar dalam melaksanakan proses pendampingan dilakukan dengan lebih maksimal lagi seperti lebih sering lagi mengadakan sosialisasi mengenai PKH lebih rutin lagi dari sebelumnya, sehingga KPM benar-benar mengerti hak dan kewajiban mereka sebagai KPM PKH, dan lebih memperketat kembali dalam hal memilih calon KPM PKH.
2. Sangat diharapkan kepada operator dan pendamping PKH untuk lebih maksimal lagi dalam melaksanakan proses pencairan dana selanjutnya agar sesuai dengan ketentuan waktu pencairan dana PKH yang telah ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Referensi:

Abidin, Said Zainal. 2002. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Pancuv Siwah.

_____ 12012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung. CV Pustaka Setia.
- Edi, Suharto. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- _____ 2013. *Kemiskinan & Perlindungan Sosial di Indonesia (Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan)*. Bandung: Alfabeta.
- Haughton, Jonathan. Shahidur R. Khandker. 2012. *Pedoman Tentang Kemiskinan dan Ketimpangan*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Koryati, Nyimas Dwi. 2004. *Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Wilayah*. Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia.
- Moleong, Lexy, J. 2009. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto, Bagong. 2007. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana.
- _____ 2013. *Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanganannya*. Malang: Intrans Publishing.
- Usman, Sunyoto. 2004. *Keadilan, Pemberdayaan, & Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta Selatan: Penerbit Belantika.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiyadi Akbar. 2003. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Jakarta: Caps

Dokumen-dokumen :

- Undang-undang nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin
- Peraturan Presiden nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
- Undang-undang nomor 11 tahun 2010 juga membahas tentang Kesejahteraan Sosial
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional

Sumber Internet

- https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sangatta_Utara,_Kutai_Timur di akses pada tanggal 10 desember 2017
- <http://mhs.pin.or.id/singagembara/profil/>
- http://www.giskemiskinankutim.com/Desa_Singa_Gembara.html#
- <http://singagembara.desa.id/?i=1>
- <http://id.m.wikipedia.org/wiki/>